

INTISARI

Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional telah mengeluarkan kebijakan terkait penyediaan dan pemutakhiran data mikro pada tingkat kelurahan/desa dalam upaya mewujudkan pembangunan kependudukan. Kebijakan Rumah DataKu telah berjalan sejak tahun 2016 yang lalu dengan tujuan sebagai pusat data dan informasi terkait kependudukan dan keluarga pada tingkat mikro. Untuk saat ini telah terbentuk sebanyak 30.825 Rumah DataKu di seluruh Indonesia dengan klasifikasi sederhana, lengkap dan paripurna.

Penelitian ini berfokus pada proses implementasi kebijakan Rumah DataKu serta melihat faktor pendukung dan penghambat dari proses implementasi tersebut. Penelitian dilakukan dengan pendekatan studi kasus pada Kalurahan Wedomartani sebagai salah satu pioneer pada tingkat provinsi DIY. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam tidak terstruktur kepada ketua, pembina dan pengurus Rumah DataKu. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter & Van Horn dengan variabel standar & tujuan kebijakan; sumber daya kebijakan; komunikasi antar organisasi & penertibannya; karakteristik lembaga pelaksana; kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta: disposisi pelaksana sebagai pisau analisisnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara variabel-variabel dalam model implementasi kebijakan Rumah DataKu Wedomartani yang mendukung hasil kinerja yang baik. Faktor pendukung pada proses implementasi terdapat pada seluruh variabel pada model implementasi Van Meter & Van Horn, namun masih ditemukan beberapa penghambat atau kendala yaitu adanya ketimpangan dalam mobilisasi pembagian kerja pada pengurus; ketidaksesuaian kebijakan waktu pemutakhiran data pada Rumah DataKu dengan waktu penyelesaian sumber data yang digunakan, serta; kurangnya aksesibilitas pengurus pada sumber data.

Kata Kunci: rumah dataku, kalurahan wedomartani, proses implementasi, model implementasi kebijakan van meter & van horn

ABSTRACT

The government, through the National Population and Family Planning Agency, has issued policies regarding the provision and updating of micro data at the sub-district/village level in an effort to realize population development. Rumah DataKu policy has been running since 2016 with the aim of becoming a center for data and information related to population and families at the micro level. Currently, 30,825 Rumah DataKu have been established throughout Indonesia with simple, complete and perfect classifications.

This research focuses on the implementation process of the Rumah DataKu policy and looks at the supporting and inhibiting factors of the implementation process. The research was carried out using a case study approach in Wedomartani Village as one of the pioneers at the DIY provincial level. The research was conducted by conducting in-depth, unstructured interviews with the chairman, supervisors and administrators of Rumah DataKu. This research uses the Van Meter & Van Horn policy implementation model with standard variables & policy objectives; policy resources; inter-organizational communication & enforcement; characteristics of implementing institutions; social, economic and political conditions, as well as: the disposition of the implementer as a tool for analysis.

The results of this research show that there is a relationship between the variables in the Rumah DataKu Wedomartani policy implementation model which supports good performance results. Supporting factors in the implementation process are found in all variables in the Van Meter & Van Horn implementation model, but several obstacles or obstacles are still found, namely the existence of inequality in the mobilization of the division of labor among administrators; incompatibility of the data update time policy on Rumah DataKu with the completion time of the data sources used, as well as; lack of administrator accessibility to data sources.

Keywords: my data house, Wedomartani sub-district, implementation process, van meter & van horn policy implementation model